

Kajian komparasi politik luar negeri Indonesia Malaysia di era pemerintahan soekarno dan soeharto, 1963-1966

Cepi Novia Tristantri^{1*}, M Syaprin Zahidi¹

¹Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Indonesia
Email: ceptristantri@gmail.com; syaprin123@umm.ac.id

Informasi artikel: Naskah diterima: 19/12/2022; Revisi: 06/06/2023; Disetujui: 03/07/2024

Abstrak: Indonesia yang baru merdeka saat itu berupaya melaksanakan politik luar negeri dengan menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan. Namun, hubungan antar negara tidak selamanya damai, seperti Indonesia dan Malaysia pada 1963-1966 dengan sebutan konfrontasi Malaysia. Setiap negara memiliki karakteristik kepemimpinan yang berbeda, khususnya masa Soekarno dan Soeharto. Penelitian bertujuan membandingkan hubungan Indonesia-Malaysia di era pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Metode kepustakaan dan analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, laporan dan arsip. Hasil penelitian menunjukkan pada era Soekarno, politik luar negeri dipengaruhi semangat anti kolonial dan anti imperialisme. Masa Soeharto mengadopsi pendekatan pragmatis dan berorientasi pada stabilitas regional serta pembangunan ekonomi. Soekarno yang revolusioner dan konfrontatif berbeda dengan Soeharto yang pragmatis dan moderat. Sehingga berdampak pada orientasi politik dan diplomasi. Hasil penelitian berkontribusi untuk memahami dinamika politik regional Asia Tenggara pada pertengahan abad ke-20 sebagai pembelajaran di masa selanjutnya. Kemudian, memberikan wawasan ideologi, kepemimpinan dan konteks internasional memengaruhi kebijakan luar negeri. Keterbatasan penelitian terletak pada sumber data pada arsip, dokumen pemerintah, dan literatur sekunder sehingga kurang mencakup seluruh perspektif, terutama Malaysia.

Kata kunci: komparasi; konfrontasi; politik; soekarno; soeharto

Abstract: The newly independent Indonesia at that time tried to carry out foreign policy by making Pancasila and the 1945 Constitution as a foundation. However, relations between countries are not always peaceful, such as Indonesia and Malaysia in 1963-1966 with the so-called Malaysian confrontation. Each country has different leadership characteristics, especially during the Soekarno and Soeharto periods. This study aims to compare Indonesia-Malaysia relations during the Soekarno and Soeharto eras. The literature method and descriptive analysis are used in this research by collecting written sources such as books, journals, articles, documents, reports and archives. The results showed that during the Soekarno era, foreign policy was influenced by the spirit of anti-colonialism and anti-imperialism. The Soeharto era adopted a pragmatic approach and was oriented towards regional stability and economic development. The revolutionary and confrontational Soekarno was different from the pragmatic and moderate Soeharto. This had an impact on political orientation and diplomacy. The results of the study contribute to understanding the dynamics of Southeast Asian regional politics in the mid-20th century as a lesson for the future. Then, it provides insight into ideology, leadership and the international context affecting foreign policy. The limitations of the research lie in the data sources in archives, government documents, and secondary literature so that it does not cover all perspectives, especially Malaysia.

Keywords: comparison; confrontation; politics; soekarno; soeharto

Pendahuluan

Politik luar negeri suatu negara, termasuk Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berasal dari sumber-sumber luar negara, seperti dinamika perpolitikan internasional, fenomena global yang terjadi, dan permasalahan regional dan internasional. Faktor internal dipengaruhi oleh keadaan dalam negeri. Seperti kondisi geopolitik negara, kondisi ekonomi dan politik, kestabilan negara, inflasi, pemimpin negara, dan sebagainya. Bentuk partisipasi bebas dan aktif Indonesia adalah dengan bergabungnya dalam perserikatan bangsa-bangsa dan menjadi salah satu penggagas konferensi Asia Afrika pada 1955. Hal yang dilakukan ini juga merupakan amanat dari pembukaan UUD 1945. Sebagai negara yang mencintai perdamaian, nyatanya dinamika perpolitikan regional dan internasional, Indonesia dihadapkan pada kondisi perpolitikan dunia yang sangat kompleks. Mungkin negara sahabat berubah menjadi negara musuh. Hal tersebut bukanlah suatu yang mustahil mengingat setiap negara dianalogikan sebagai individu yang memiliki kepentingan dan egonya masing-masing. Seperti halnya konfrontasi yang terjadi antara Indonesia-Malaysia yang berlangsung selama tiga tahun dan memengaruhi kedua negara diberbagai sektor. Mulai dari sektor politik, ekonomi, sosial, dan keamanan.

Hal ini tentu menjadi pembelajaran agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Politik luar negeri pada saat konfrontasi Indonesia-Malaysia melenceng dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif (Kusmayadi, 2017). Sebenarnya keputusan Soekarno untuk mengambil sikap tegas terhadap Malaysia tidak sepenuhnya salah karena sebagai negara yang besar dan bertetangga dengan Malaysia, Indonesia tidak ingin negara terdekatnya menjadi boneka negara asing yang imperialis dan kolonialis. Jika hal ini dibiarkan, maka negara tersebut berpotensi untuk menjadi basis penyebaran pengaruh dan paham, bahkan mengekspansi kekuasaannya terhadap negara-negara disekitar negara basis tersebut (Kusmayadi, 2017). Ganyang! menjadi lagu yang paling populer di masa konfrontasi 1963-1966 (Farram, 2014). Peristiwa yang terjadi pada 1965-1998 merupakan dampak perang dingin yang mempengaruhi banyak negara didunia (Maksum & Bustami, 2014).

Peristiwa konfrontasi yang terjadi pada 1963-1966 memunculkan banyak literatur yang mengkaji konfrontasi ini dalam berbagai perspektif, seperti perspektif ekonomi, hubungan internasional, ekonomi, dan lainnya. Sebagai negara yang memiliki banyak kemiripan dibidang sosial-budaya, nyatanya hubungan Indonesia-Malaysia juga tidak selamanya berjalan mulus dan kerap kali mengalami pasang surut (Sunarti, 2014). Hubungan antar dua negara utamanya dipengaruhi oleh kepentingan nasional dan figur pemimpin negaranya. Sunarti kemudian memperjelas bahwa banyaknya kesamaan dan sebutan negara serumpun pun kadang bisa menjadi sebuah permasalahan. Dengan dinamika yang terjadi pada internal negara, terutama bagi negara-negara yang terletak pada satu kawasan yang sama memberikan implikasi berbeda dibanding negara yang berada pada kawasan yang berbeda. Sebagaimana yang terjadi pada hubungan Indonesia dan Malaysia pada tahun 1966-1966, konflik bilateral ini meskipun tidak menimbulkan konflik secara fisik, tetap memiliki potensi dalam menciptakan persaingan dan

konflik kawasan di Asia Tenggara. Selain itu, sebagian wilayah negara Malaysia yang berada di Pulau Kalimantan juga berpotensi menciptakan ketegangan didaerah perbatasan sebagai imbas dari konflik pemerintahnya. Penelitian ini hadir sebagai upaya untuk mengkomparasikan hubungan Indonesia dengan Malaysia dalam rentang tahun 1966-1966. Konflik bilateral negara melayu ini bermula di era kepemimpinan soekarno dan berakhir di era kepemimpinan soeharto. Melalui fakta ini dapat ditarik kesimpulan bahwa soeharto lebih mengedepankan perdamaian dengan Malaysia yang terbukti dengan tercapainya kesepakatan damai antar kedua negara. Dengan mengkomparasikan hubungan Indonesia dan Malaysia ini, diharap dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menghindari hal-hal yang bersifat menimbulkan konflik serta mengupayakan hal-hal yang meningkatkan hubungan Indonesia dan Malaysia. Karena makin dekat letak suatu negara dengan negara lain, makin tinggi tingkat possibility konfliknya.

Urgensi penelitian ini terletak pada jejak sejarah hubungan Indonesia dan Malaysia yang diwarnai oleh beberapa konflik sehingga penelitian ini dibutuhkan untuk memperhatikan lebih saksama lagi tentang kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh dua negara yang sedang berkonflik agar tidak terulang kembali. Juga sebagai pengetahuan bagi generasi muda bangsa Indonesia untuk menjaga sikap demi menghindari tersinggungnya warga negara lain yang berpotensi merugikan bangsa dan negara sendiri. Sebagaimana sejarah konflik Indonesia dan Malaysia pada tahun 1963, kemudian pada tahun 2002 tentang klaim pulau Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia, pada tahun 2005 konflik sengketa kepemilikan Ambalat, tahun 2007 tentang klaim lagu Rasa Sayang-Sayange oleh Malaysia dan Indonesia mengklaim lagu tersebut merupakan lagu daerah Maluku. Konflik juga terjadi pada 2011 dengan pelanggaran batas oleh nelayan Malaysia serta adanya perubahan tapal batas di kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Nilai kebaruan pada artikel ini terletak pada pengadopsian pendekatan komparatif yang secara sistematis membandingkan kebijakan luar negeri di bawah dua pemimpin Indonesia yang berbeda secara ideologis dan strategis. Analisis ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana perubahan kepemimpinan dan konteks politik domestik serta internasional memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia.

Hasil dari studi komparatif ini dapat memberikan pelajaran dan referensi bagi pembuat kebijakan kontemporer tentang bagaimana faktor-faktor seperti kepemimpinan, ideologi, dan konteks internasional dapat memengaruhi hubungan bilateral. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik kebijakan luar negeri, khususnya dalam konteks negara berkembang yang menghadapi situasi geopolitik yang kompleks. Kajian-kajian sebelumnya hanya membahas tentang hubungan Indonesia-Malaysia selama konfrontasi dan hanya membahas satu periode kepemimpinan saja. Seperti penelitian oleh Irshanto (2019) dengan judul dari konfrontasi ke perdamaian (hubungan Indonesia-Malaysia 1963-1966) yang membahas proses damai antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian penelitian oleh Kusmayadi (2017) dengan judul politik luar negeri republik Indonesia pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1963-1966 yang hanya membahas tentang politik luar negeri Indonesia dimasa itu yang melenceng dari prinsip politik luar negeri, bebas dan aktif. Penelitian oleh Budiawan

(2017) yang berjudul *how do Indonesians remember konfrontasi? Indonesia-Malaysia relations and the popular memory of confrontation after the fall of Suharto* yang mengatakan bahwa sentimen nasionalisme yang terjadi dimasa itu sebagai salah sat manifestasi dari kerinduan akan kebanggaan nasional yang diproyeksikan dalam kepribadian Soekarno. Sehingga, belum ada penelitian yang menggunakan studi komparasi untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antar dua masa kepemimpinan yang berbeda dalam satu bidang. Hasil penelitian ini berkontribusi sebagai pengembangan dari kajian historis bangsa Indonesia dimasa konfrontasi tahun 1963-1966 dalam dua periode kepemimpinan. Sehingga dapat mengetahui perbedaan dan persamaan karakteristik kepemimpinan yang kemudian berdampak pada hubungan politik, dan kebijakan luar negeri Indonesia dimasa itu. Penelitian historis ini berkontribusi sebagai pengingat hubungan negara bertetangga, seperti Indonesia dengan Malaysia, ditambah dengan kesamaan kebudayaan dan kebangsaan Melayu meski memiliki banyak persamaan, hal tersebut yang kerap menjadi pemicu terjadinya konflik.

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengingat kembali faktor-faktor terjadinya konflik agar tidak terulang dikemudian hari mengingat dampak dan kerugian yang ditimbulkan. Baik dari sektor ekonomi, sosial dan budaya, serta keamanan. Konfrontasi ini juga menyebabkan ketegangan didunia internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperdalam pemahaman tentang evolusi politik luar negeri Indonesia selama era Soekarno dan Soeharto, terutama dalam konteks konfrontasi dengan Malaysia. Dengan mengungkap perbedaan pendekatan, orientasi ideologis, dan strategi diplomasi antara kedua era tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan landasan yang kuat bagi analisis yang lebih terperinci tentang faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan memperkaya literatur akademik dan memberikan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan yang berguna untuk merumuskan strategi luar negeri yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika regional dan global yang terus berubah.

Metode

Metode kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data historis (Huda, 2021) serta kebijakan luar negeri kedua negara selama periode konfrontasi. Berdasarkan penelitian oleh (Maksum & Bustami, 2014) dengan tema politik luar negeri Indonesia era soekarno: Konfrontasi Indonesia-Malaysia, dapat diketahui bahwa di era Soekarno, politik luar negeri Indonesia didominasi oleh semangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Sedangkan di Era Soeharto, Indonesia menjadi lebih pragmatis dan fokus pada pembangunan ekonomi. Perbedaan karakter ini yang berdampak pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Hal ini yang kemudian menjadi menarik karena perbedaan kepemimpinan dua pemimpin negara dalam hal ini adalah Presiden, berdampak signifikan pada hubungan antar negara. Dalam melakukan penelitian, langkah pertama dalam menentukan kredibilitas dan relevansi sumber adalah melakukan penelusuran literatur tertulis menggunakan Scopus, CrossRef Metadata Research, Indonesia Onesearch, serta Google sebagai *search engine* untuk

menemukan berbagai jenis sumber, termasuk buku, artikel jurnal, dokumen pemerintah, arsip, dan laporan diplomatik dari periode tersebut. Teknik instrumen yang digunakan dalam penelusuran ini meliputi kata kunci spesifik terkait topik penelitian dan penggunaan filter untuk memastikan relevansi dan kualitas sumber yang ditemukan. Dalam proses ini, sumber-sumber dipilih berdasarkan kriteria kredibilitas dan relevansi. Kredibilitas sumber ditentukan dengan mempertimbangkan reputasi penulis, penerbit, serta validitas dan keakuratan data yang disajikan. Relevansi sumber diukur berdasarkan seberapa dekat isi sumber tersebut dengan topik penelitian, serta kontribusinya dalam menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti menerapkan metode triangulasi (Moleong, 2018) dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data. Setelah mengumpulkan berbagai sumber, peneliti menganalisis informasi yang terkandung untuk mengidentifikasi pola, tema, dan perbedaan dalam pendekatan kebijakan luar negeri antara kedua era pemerintahan. Teknik analisis data yang digunakan mencakup analisis konten dan komparatif (Arikunto, 2014) untuk menemukan kesamaan dan perbedaan yang signifikan. Analisis ini dilakukan melalui sintesis dari berbagai sumber yang telah diverifikasi kredibilitas dan relevansinya. Peneliti dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang bagaimana masing-masing pemimpin menghadapi konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Penggunaan metode kepustakaan memungkinkan peneliti untuk membangun argumen yang kuat dan berbasis bukti, serta memberikan kontribusi baru dalam memahami dinamika hubungan internasional di Asia Tenggara pada masa konflik Indonesia-Malaysia.

Hasil dan Pembahasan

Politik luar negeri Indonesia era orde lama

Politik luar negeri Indonesia dimulai dari era orde lama yang dipimpin oleh Ir. Soekarno selaku presiden pertama republik Indonesia pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945. Politik luar negeri Indonesia tidak hanya membahas tentang instrumen apa dan bagaimana Indonesia melakukan hubungan luar negerinya dengan negara lain, tetapi lebih dalam daripada itu, yaitu tentang pandangan dan sikap Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya serta upaya-upaya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan nasional Indonesia saat itu. Oleh karena itu, digunakanlah Pancasila dan UUD 1945 sebagai pandangan dan pedoman arah politik luar negeri Indonesia agar tidak keluar dari haluan-haluan negara. Di era orde lama dengan kepemimpinan Soekarno inilah Indonesia mengalami masa-masa sulit di mana terjadi gejolak dan ketidakstabilan politik dimana-mana, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, Indonesia dihadapkan pada melunjaknya animo rakyat Indonesia untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan yang telah ratusan tahun dinantikan bangsa Indonesia sejak masa penjajahan Belanda hingga Jepang sampai akhirnya berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Meski demikian, Indonesia dihadapkan kembali dengan tantangan yang lebih besar, yakni memperjuangkan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan dari dunia internasional dengan tidak mudah. Di era kepemimpinan soekarno

sedari awal Indonesia berambisi untuk menjadi pemimpin Asia, terutama Asia Tenggara. Bahkan, pasca diselenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, Soekarno mengklaim bahwa Indonesia dapat menjadi pemimpin untuk negara Asia dan Afrika. Dimasa orde lama ini Indonesia terlihat memiliki kedekatan khusus dengan republik rakyat Tiongkok, sedangkan di sisi lain, kurang memiliki hubungan baik dengan negara barat yang dianggap sebagai negara kolonialis dan imperialis oleh Soekarno, termasuk renggangnya hubungan Indonesia dengan Malaysia. Soekarno terfokus pada pembenahan politik ditengah-tengah kondisi perekonomian dalam negeri Indonesia yang memburuk. Indonesia di masa ini fokus terhadap perbaikan ekonomi dalam negeri, di mana banyak hal di sektor ekonomi yang berada di bawah kendali negara. Hal semacam ini lebih terlihat sebagai salah satu penerapan model marxisme, yang mana salah satu perspektif yang digunakan untuk menjelaskan fenomena ekonomi, khususnya ekonomi internasional. Windari and Aziz (2022) mengemukakan bahwa memanfaatkan peluang ekonomi di tengah-tengah globalisasi bukan suatu hal yang menunjukkan sebagai bangsa yang lemah, tetapi justru sebagai salah satu upaya efektif untuk mencapai tujuan yang lebih substantif. Mengutamakan kepentingan rakyat merupakan salah satu wujud demokrasi (Windari & Aziz, 2022).

Politik luar negeri Indonesia di era orde baru

Orde baru merupakan era kepemimpinan terlama di Indonesia dengan masa 32 tahun sejak 1968 hingga 1998 yang dipimpin oleh Soeharto yang pada saat itu dipilih oleh MPRS untuk menggantikan presiden RI yang sebelumnya dijabat oleh Ir. Soekarno (Maksum & Bustami, 2014). Dengan eranya yang begitu panjang, tentu ada banyak sektor yang berjalan dengan dinamika yang variatif. Orde baru memiliki banyak corak pemerintahan dan kepemimpinan yang berbeda dengan orde lama. Baik dari presidennya, jajaran menteri, maupun unsur perbantuan lain. Sehingga era ini memiliki karakteristik dan unsur khas yang tidak dimiliki era orde lama. Karakteristik tersebut adalah gaya militeristik dan terpusat. Dengan artian bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara ditentukan serentak dan seragam oleh pemerintah pusat. Meski terkesan otoriter, namun hal ini ditujukan untuk mengupayakan pembangunan ekonomi serta kestabilan politik yang dimasa itu menjadi fokus utama karena berjalan cukup buruk. Diawal kepemimpinannya, Soeharto dihadapkan pada realitas permasalahan ekonomi dalam negeri yang luar biasa buruk sebagai warisan dari pemerintahan sebelumnya di orde lama. Terjadi pengalihan fokus dari pembangunan bangsa menjadi pembangunan ekonomi karena memang sektor ekonomi yang harus diprioritaskan pada saat itu. Selain itu, juga perbaikan hubungan dengan pihak Barat yang dimasa pemerintahan sebelumnya berjalan cukup dingin. Secara prinsip, Soeharto hanya melakukan pemurnian prinsip politik luar negeri Indonesia, bukan merubah haluannya. Dalam pidatonya pada 1966 dihadapan majelis permusyawaratan rakyat sementara, pada intinya Soeharto menyampaikan tentang dua fokus utama politik luar negeri Indonesia, yakni stabilitas keamanan dan pembangunan. Pembangunan bandara juga merupakan hal esensial untuk meningkatkan arus pertukaran barang dan jasa (Huynh et al., 2020). Tidak jauh berbeda dengan era pemerintahan

orde lama, pemerintahan orde baru juga tentu memiliki kepentingan nasional Indonesia yang ingin diraih untuk kemaslahatan rakyat. Salah satu instrumen yang digunakan untuk merealisasikan hal tersebut adalah dengan melalui politik luar negeri yang kemudian diaktualisasikan dalam kebijakan politik luar negeri. Hal yang menjadi tujuan utama orde baru adalah pembangunan dan kestabilan politik. Dimasa ini orde baru berjuang dengan sangat keras untuk mengembalikan arah politik luar negeri Indonesia pada haluan awal dan mengembalikan nama baik bangsa yang sempat tercoreng dimasa orde lama dengan berbagai peristiwa yang pernah terjadi. Seperti, orde lama yang terkesan condong ke salah satu blok, yakni blok timur, sedangkan prinsip politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Hal ini kemudian ditanggapi dalam pemerintahan orde baru dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan republik rakyat Tiongkok meski pada 1990 Indonesia dan Tiongkok kembali membuka hubungan diplomasi atas kepentingan ekonomi.

Politik luar negeri orde baru sering dianggap sebagai antitesis dari orde lama. Politik luar negeri Indonesia dimasa orde lama terkesan terlalu high profile, revolusioner, dan berani terhadap berbagai hal yang dirasa tidak sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia. Di era orde baru, soeharto berpandangan untuk lebih mengutamakan visi dan misi jangka panjang serta lebih low profile. Soeharto dipandang sebagai pemimpin yang tegas, berani, cerdas, dan teliti dalam menentukan arah kebijakannya. Perbedaan lainnya terletak pada segi pergaulannya, soekarno yang cenderung hangat, ramah tamah, dan populer berbanding terbalik dengan soeharto yang terkesan otoriter dan sangat formal. Kesan ini diperkuat dengan banyaknya pengerahan militer yang dilakukan sebagai garda utama negara. Meski demikian, hal ini jugalah yang meningkatkan efisiensi perpolitikan dalam dan luar negeri karna pemerintahannya tidak pandang bulu. Soekarno dan soeharto memiliki perbedaan gaya politik luar negeri. Soekarno dalam menangani permasalahan internasional cenderung untuk menggunakan kekuatan yang cukup agresif dengan penekanan-penekanan terhadap pihak yang terlibat meski tidak sepenuhnya melupakan soft power seperti diplomasi dan kerja sama. Di era Soeharto politik luar negeri Indonesia cenderung soft power di mana Soeharto berusaha untuk mem-framing Indonesia sebagai negara yang ramah namun tetap tegas.

Di era ini, Indonesia cenderung lebih berhati-hati dalam bersikap dan mengutamakan politik kawasan. Karena menurut soeharto, untuk menciptakan kestabilan dimulai dari dalam negeri yang kemudian diperkuat dengan kestabilan di kawasan. Dimasa ini Soeharto berusaha mengembalikan hubungan baik Indonesia dengan beberapa negara, seperti Malaysia dan Singapura serta melibatkan diri kembali pada pergaulan internasional dengan membina hubungan baik di wilayah regional dan internasional. Kebijakan-kebijakan keras dan konfrontatif dimasa orde lama diubah pada masa orde baru menjadi hubungan yang lebih damai dan bersahabat. Seperti, normalisasi hubungan antara Indonesia-Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1966 yang berlokasi di Jakarta, bergabungnya kembali Indonesia dengan PBB pada 1966 setelah sebelumnya mengeluarkan diri pada 1965 dan terkesan dikucilkan dari pergaulan internasional saat itu (Kusmayadi, 2017), meningkatkan kerja sama regional dengan menjadi salah satu penggagas terbentuknya ASEAN, menjadi ketua organisasi konferensi islam (OKI), serta menjadi

salah satu penggagas gerakan non blok. Meski dianggap sebagai era yang cukup stabil, nyatanya ada beberapa hal yang justru mencoreng nama baik ini. Seperti pemutusan hubungan diplomatik Indonesia dengan republik rakyat Tiongkok meski kemudian dinormalisasikan pada 1990 dengan alasan ekonomi. Instrumen yang paling sering digunakan Indonesia untuk meraih national interest adalah dengan membuka investasi dari asing, menerima bantuan dari negara asing, perdagangan bebas, serta kerja sama diwilayah regional. Dimasa orde baru Indonesia berhasil menunjukkan peningkatan yang pesat dalam berbagai sektor, seperti dari sektor pembangunan dan ekonomi. Karena salah satu cara untuk meningkatkan pembangunan ekonomi adalah bergabung dengan dunia luar (Windari & Aziz, 2022). Meski secara looking outward Indonesia dikenal sebagai bangsa yang low profile, tetapi di dalam negeri terkesan sangat keras dan otoriter. Ada banyak pembatasan yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan eksistensi kekuasaannya. Terutama dalam hal penyampaian suara atau aspirasi (Booth, 2000) yang sangat dibatasi hingga menyebabkan demokrasi mati dinegeri sendiri. Sentralisasi yang cukup ekstrem kemudian memunculkan gejala gerakan separatis, seperti di Aceh, Timor Timur, dan Irian Jaya yang direspon dengan pengerahan kekuatan militer oleh pemerintah. Para petinggi militer banyak ditugaskan sebagai duta besar, jabatan pemerintahan juga banyak dikuasai oleh kalangan militer. Pada titik inilah militer banyak berperan dalam perpolitikan luar negeri orde baru yang pada akhirnya menempatkan Indonesia sebagai negara yang high profile.

Tabel 1

Perbandingan politik luar negeri Indonesia pada era soekarno dan soeharto (komparasi dari buku "Nationalism and Revolution in Indonesia", "The Road to Power: Indonesian Military Politics 1945-1967", A History of Modern Indonesia Since c.1200", "Indonesian Forein Policy and The Dilemma of Dependence: From Sukarno to Soeharto", "Indonesian Politics Under Suharto: The Rise and Fall of the New Order")

Era Soekarno	Era Soeharto
Fokus dalam rangka mempejuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru dideklasikan.	Fokus pada pembangunan, kestabilan ekonomi, dan keamanan.
Terkesan lebih condong ke blok kiri (sosialis-komunis).	Berupaya untuk menstabilkan hubungan antara blok kanan dan blok kiri.
Keluar dari PBB pada 1961 karena diangkatnya Malaysia sebagai DK Tidak Tetap PBB dimasa konflik Indonesia-Malaysia.	Indonesia bergabung kembali dengan PBB pada 1966 sebagai salah satu upaya menstabilkan kondisi domestik Indonesia saat itu.
Indonesia terlibat dengan cukup aktif dalam pergaulan internasional, seperti menjadi salah satu penggagas terbentuknya ASEAN dan KAA sert menjadi ketua (OKI).	Indonesia berperan dengan lebih aktif dan terbuka terhadap kerjasama dan hubungan dengan berbagai negara dan entitas non-negara lainnya.
Sempat melenceng dari prinsip politik luar	Berusaha memurnikan kembali prinsip

negeri Indonesia yang bebas dan aktif karena ada kecenderungan pada salah satu blok serta adanya konflik dengan beberapa negara.

Indonesia dimasa ini terkesan *over protective* terhadap hal-hal yang dirasa tidak sejalan/sepaham dengan jatidiri bangsa Indonesia.

Merupakan masa dimana konfrontasi Indonesia-Malaysia sejak 1963 bermula.

Terjadi gejolak diberbagai sektor, seperti politik dan ekonomi yang belum stabil, ditambah dengan konfrontasi Indonesia-Malaysia yang semakin memperburuk keadaan.

Bersikap idealis-realis. Dimana memegang teguh prinsip-prinsip kebangsaan dan berambisi untuk menjadi pemimpin Asia.

Dimasa ini terjadi kemunduran ekonomi yang cukup berpengaruh, terutama untuk sektor perdagangan dan diwilayah sekitar perbatasan Indonesia-Malaysia.

Terjadi pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia.

Terjadi perdagangan illegal pada beberapa komoditas, terutama hasil pertanian dan perikanan karena rakyat kehilangan tujuan ekspor dan impornya.

Politik luar negeri yang cukup agresif dan penuh penekanan terhadap negara-negara yang dirasa merupakan penyebab dan pendorong terhadap keamanan nasional dan regional.

Penggunaan *hard power* cukup mendominasi.

Bersahabat dengan negara-negara blok kiri.

Pemimpin yang tegas, ramah, dan populer dikalangan rakyat Indonesia.

politik luar negeri Indonesia, salah satunya dengan memperbaiki hubungan dengan berbagai negara dan kawasan yang sempat memiliki kerenggangan.

Cukup terbuka dengan perubahan, kerjasama, dan hubungan dengan dunia internasional.

Era dimana konfrontasi Indonesia-Malaysia diselesaikan dan berakhir perdamaian kedua negara pada 1966.

Kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara tidak sepenuhnya stabil, akan tetapi banyak sektor, terutama ekonomi dan pembangunan manusia yang lebih baik dibanding dengan pemerintahan sebelumnya.

Lebih bersikap liberalis dengan menerima berbagai bantuan dan kerjasama internasional.

Kondisi ekonomi membaik seiring dengan normalisasi hubungan diplomatik, sehingga arus perdagangan barang dan jasa dapat berjalan kembali.

Normalisasi hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Perdagangan illegal mampu dibendung dan berjalan normal perlahan.

Politik luar negeri yang diterapkan lebih menggunakan cara-cara *soft diplomacy*.

Penggunaan *soft power* mendominasi

Terkesan anti blok kiri, hal ini diperkuat dengan pemutusan hubungan diplomatik antara Indonesia-Tingkok meski kemudian dinormalisasi pada 1989.

Pemimpin yang tegas, cerdas, dan otoriter. Hal ini berdampak pada pembatasan beberapa sektor dan pemerintahan dengan sistem terpusat.

Di era soekarno, fokus utama kebijakan luar negeri adalah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru dideklarasikan, dengan pendekatan yang cenderung ideologis dan revolusioner. Sebaliknya, di era soeharto, kebijakan luar negeri lebih berfokus pada pembangunan ekonomi, kestabilan, dan keamanan dengan pendekatan yang lebih pragmatis dan terarah pada kesejahteraan domestik. Dalam hal orientasi ideologis, era soekarno cenderung berpihak pada blok kiri (sosialis-komunis), menjalin hubungan erat dengan negara-negara sosialis seperti Uni Soviet dan Tiongkok. Di era soeharto, Indonesia berupaya menstabilkan hubungan antara blok kanan dan kiri, dengan pendekatan diplomasi yang lebih seimbang dan pragmatis. Keanggotaan Indonesia dalam PBB juga mencerminkan perbedaan strategi kedua era ini. Soekarno memutuskan untuk keluar dari PBB pada 1965 sebagai protes terhadap pengangkatan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sebaliknya, soeharto membawa Indonesia bergabung kembali dengan PBB pada 1966 sebagai bagian dari upaya menstabilkan kondisi domestik dan memperbaiki hubungan internasional.

Peran internasional Indonesia juga berbeda di kedua era. Di masa soekarno, Indonesia sangat aktif dalam organisasi internasional seperti ASEAN, KAA, dan OKI, mempromosikan solidaritas anti imperialisme. Di masa soeharto, Indonesia lebih terbuka terhadap kerja sama internasional dan berperan aktif dalam memperkuat hubungan dengan berbagai negara dan entitas non-negara. Prinsip politik luar negeri Indonesia juga mengalami pergeseran. Di era Soekarno, kebijakan sering melenceng dari prinsip bebas dan aktif dengan kecenderungan pada satu blok serta konflik dengan beberapa negara. Soeharto, sebaliknya, berusaha memurnikan kembali prinsip bebas dan aktif, memperbaiki hubungan dengan negara dan kawasan yang sebelumnya renggang. Soekarno sangat protektif terhadap hal-hal yang dianggap tidak sejalan dengan jati diri bangsa, sementara Soeharto lebih terbuka terhadap perubahan, kerja sama, dan hubungan internasional. Konfrontasi Indonesia dan Malaysia dimulai di era soekarno pada 1963 dan diselesaikan di era soeharto pada 1966. Kondisi domestik di era soekarno penuh dengan gejolak politik dan ekonomi yang belum stabil, diperparah oleh konfrontasi dengan Malaysia.

Di era soeharto, stabilitas yang lebih baik dicapai di beberapa sektor, terutama ekonomi dan pembangunan manusia meskipun tidak sepenuhnya stabil. Dalam hal sikap politik, Soekarno bersikap idealis-realis dengan ambisi menjadi pemimpin Asia, sedangkan Soeharto lebih liberalis dengan penerimaan bantuan dan kerja sama internasional. Kemunduran ekonomi signifikan terjadi di era Soekarno, terutama dalam perdagangan di wilayah perbatasan, sementara kondisi ekonomi membaik di era soeharto seiring normalisasi hubungan diplomatik, mengaktifkan kembali arus perdagangan. Hubungan diplomatik juga berbeda, dengan pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia di era soekarno dan normalisasi hubungan di era soeharto. Perdagangan ilegal marak di era Soekarno karena kehilangan tujuan ekspor dan impor, sementara di era soeharto, perdagangan ilegal dibendung dan perdagangan normal pulih. Pendekatan diplomatik juga berubah dari agresif dan penuh penekanan di era Soekarno menjadi lebih mengedepankan soft diplomacy di era soeharto. Penggunaan kekuatan juga bergeser dari dominasi hard power di era soekarno ke dominasi soft power di era soeharto. Soekarno

bersahabat dengan negara-negara blok kiri, sedangkan soeharto terkesan anti blok kiri, termasuk pemutusan hubungan diplomatik dengan Tiongkok yang dinormalisasi pada 1989. Gaya kepemimpinan juga berbeda. Soekarno dikenal sebagai pemimpin yang tegas, ramah, dan populer di kalangan rakyat Indonesia, sementara soeharto dikenal sebagai pemimpin yang tegas, cerdas, dan otoriter, dengan sistem pemerintahan yang terpusat dan pembatasan di beberapa sektor. Politik luar negeri Indonesia di era soekarno dan soeharto menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pendekatan, orientasi ideologis, dan strategi diplomasi. Soekarno berfokus pada perjuangan ideologis dan anti imperialisme dengan pendekatan konfrontatif, sementara soeharto mengedepankan pragmatisme, pembangunan ekonomi, dan stabilitas dengan pendekatan diplomasi yang lebih lembut dan inklusif. Perubahan ini mencerminkan pergeseran prioritas nasional dari politik ideologis ke pembangunan ekonomi dan stabilitas domestik.

Hubungan Indonesia dan Malaysia era orde lama

Prinsip politik luar negeri merupakan hal mutlak yang harus dijaga dan diterapkan oleh Indonesia sebagai peace broker dan untuk menjaga eksistensinya. Tetapi, di era orde lama ini, hal tersebut tidak berjalan dengan baik. Soekarno dengan pemikiran idealis dan ambisinya beberapa kali menetapkan kebijakan luar negeri yang kontroversial dan menempatkan Indonesia pada posisi dilema yang sulit. Dimasa ini hubungan luar negeri antara Indonesia dengan Malaysia berjalan kurang harmonis. Hubungan Indonesia dan Malaysia memburuk saat adanya wacana pembentukan federasi Malaysia antara Malaysia, Singapura, dan Sarawak oleh Tuanku Abdul Rahman (Irshanto, 2019). Kerenggangan ini juga disebabkan karena adanya beberapa klaim kebudayaan oleh Malaysia terhadap kebudayaan asli Indonesia, sengketa kepemilikan pulau di Laut Sulawesi oleh Malaysia (Butcher, 2013), rencana pembentukan federasi Malaysia, kemudian diperparah dengan diterimanya Malaysia sebagai DK Tidak Tetap PBB dimasa konflik saat Indonesia masih menjadi anggota PBB. Hal tersebut membuat hubungan kedua negara ini memanas. Singkatnya, konfrontasi Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah persetujuan yang terjadi antara Malaysia, Sabah, Serawak, serta Brunei. Situasi ini terjadi pada 1963-1966 antara Indonesia dengan federasi Malaysia.

Konflik yang terjadi dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah Malaysia untuk membentuk pemerintahan federasi Malaysia atau persekutuan tanah melayu yang terdiri dari Brunei, Serawak, dan Sabah pada tahun 1961. Keinginan ini ditentang keras oleh soekarno. Hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Manila yang pernah dilakukan. Soekarno juga berpandangan bahwa federasi tersebut merupakan alat bagi Inggris untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme gaya baru. Hal ini mengkhawatirkan keamanan nasional Indonesia dan keamanan regional Asia Tenggara. Nugroho (2016) menuturkan bahwa wacana pembentukan federasi Malaysia juga dipengaruhi atas kecemburuan barat yang memandang soekarno lebih condong dengan negara kiri atau timur. Wacana ini ditentang keras oleh pemerintah Indonesia, soekarno pada saat itu menyampaikan bahwa pembentukan federasi Malaysia tidak lain hanya boneka bentukan Inggris untuk melakukan kontrol di wilayah Asia Tenggara. Kusmayadi (2017) juga berpandangan bahwa konflik yang terjadi antara

Indonesia dan Malaysia ini kemudian dimanfaatkan oleh PKI untuk mendekatkan Indonesia kepada negara asing yang berhaluan komunis, seperti RRC, Korea Utara, serta Uni Soviet pada saat itu. Konfrontasi yang terjadi juga memberikan dampak terhadap perkembangan Islam moderat di Indonesia (Windari & Aziz, 2022). Keterlibatan organisasi islam yang digembargemborkan oleh soekarno pada saat itu berdampak pada terjadinya krisis politik islam secara domestik. Dengan berbagai pertimbangan, seperti letak geografis antara Indonesia dan Malaysia yang berdekatan, rasa serumpun sebagai bangsa melayu, sejarah hubungan baik kedua negara sebelumnya, saling ketergantungan antar kedua belah pihak hingga untuk menjaga kestabilan regional Asia Tenggara, Indonesia melakukan upaya diplomasi dengan pemerintah Malaysia untuk menyudahi konflik. Pada saat itu soekarno bertemu dengan perdana menteri Malaysia, Tuanku Abdul Rahma di Tokyo, Jepang, di tahun 1963. Pertemuan itu kemudian ditindaklanjuti dengan adanya konferensi tingkat menteri luar negeri di Manila, Filipina pada 1963. Pertemuan ini dihadiri oleh tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Ketiga negara melakukan kesepakatan pembentukan federasi Malaysia. Tetapi, Malaysia melakukan pelanggaran terhadap perjanjian ini dengan ditandatangani pembentukan federasi Malaysia oleh perdana menteri Malaysia, Tuanku Andul Rahma dengan Inggris. Naskah pembentukan itu ditandatangani pada Juli 1963 di London, Inggris. Inti naskah tersebut adalah pembentukan federasi Malaysia akan dilaksanakan pada 1963. Soekarno menentang pembentukan federasi Malaysia.

Pemuda Malaysia geram akan pernyataan soekarno dan sikap Indonesia yang seolah-olah ikut campur terhadap penentuan masa depan negaranya. Terbukti adanya aksi anarkis oleh pemuda pemudi Malaysia dengan cara menyerang kantor kedutaan besar Indonesia di Kuala Lumpur. Hal senada juga dilakukan Indonesia dengan melakukan aksi yang sama terhadap kantor Kedutaan Malaysia dan kedutaan Inggris. Selain penyerangan terhadap kantor atase negara, aksi anarkis menjaral disekitar perbatasan Indonesia dan Malaysia di pulau Kalimantan. Dimasa ini lahir slogan konfrontasi Malaysia dan ganyang Malaysia yang populer. Bahkan, lagu ganyang! turut mewarnai di era tahun 1963-1966 (Farram, 2014). Indonesia cukup dikucilkan dari dunia internasional karena dianggap sebagai negara yang mencari masalah dan mencampuri urusan negara lain. Masyarakat Indonesia turut menaruh rasa kecewa terhadap pemerintahan soekarno dan menyebabkan terjadinya aksi demonstrasi. Pada akhirnya soekarno mulai melunak dan konflik antara Indonesia dan Malaysia ini dapat diselesaikan dimasa pemerintahan selanjutnya, yakni di era orde baru dengan soeharto sebagai pemimpinnya. Stigma buruk terhadap Indonesia saat itu diperparah dengan pelarangan penggunaan mata uang Singapura dan Malaysia yang sebelumnya sering digunakan di kepulauan Riau diberlakukan sejak 15 Oktober 1953 yang diganti dengan penggunaan mata uang kepulauan Riau rupiah (KRRp) dalam mendedollarisasi atau mengurangi penggunaan dolar secara bertahap.

Hubungan Indonesia dan Malaysia era orde baru

Hubungan Indonesia dan Malaysia di era orde baru mengalami pemulihan. Soeharto berupaya menstabilkan hubungan Indonesia dengan banyak negara. Upaya ini dilakukan dengan menormalisasi hubungan Indonesia dengan banyak negara, seperti Singapura, Brunei

Darussalam, dan terutama Malaysia. Upaya perbaikan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Banyak penderitaan dan kerugian yang diakibatkan dengan adanya konflik antar dua negara. Politik luar negeri era orde lama kemudian memanasikan prinsipnya dalam sebuah pembentukan persetujuan Bangkok dengan isi utamanya penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia yang sebelumnya terputus. Setelah upaya ini terealisasi, kemudian diikuti dengan aksi-aksi damai Indonesia lainnya dengan kembali bergabung menjadi anggota PBB pada 1966. Di era orde baru konfrontasi yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia terselesaikan melalui persetujuan Bangkok pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Inti dari persetujuan ini adalah mengakhiri konflik yang terjadi serta memulihkan kembali hubungan diplomatik kedua negara. Persetujuan Bangkok ditandatangani oleh perdana menteri Adam Malik dari Indonesia dan Tuan Abdul Razak dari Malaysia. Perjanjian ini kemudian ditandatangani pada 11 Agustus 1966 dan menandakan konflik antara Indonesia dan Malaysia berakhir. Adapun hasil dari persetujuan Bangkok, yaitu.

Rakyat Sabah dan Serawak diberikan kesempatan lagi untuk mempertimbangkan kembali posisi mereka dalam kemasyarakatan Malaysia. Kedua pemerintah, yakni Indonesia dan Malaysia berkenan untuk memulihkan hubungan diplomatik. Bersedia menghentikan segala macam bentuk permusuhan.

Tabel 2

Perbandingan hubungan Indonesia-Malaysia pada era soekarno dan soeharto (komparasi dari buku "Indonesia's Foreign Policy", "Historical Atlas of Indonesia", "Konfrontasi: The Indonesia-malaysia Dispute", "Suharto: A Political Biography", "A History of Modern Indonesia Since c.1200", "Indonesian Foreign Policy and The Dilemma of Dependence: From Sukarno to Soeharto", "Indonesian Politics Under Suharto: The Rise and Fall of the New Order")

Era Soekarno	Era Soeharto
Hubungan Indonesia dengan Malaysia kurang harmonis. Karena berbagai hal, seperti ada klaim kebudayaan dan geografi oleh Malaysia, seperti sengketa kepemilikan pulau di Laut Sulawesi.	Berjalan cukup baik perlahan.
Buruknya hubungan Indonesia-Malaysia diperparah dengan adanya Federasi Malaysia dengan bantuan Inggris.	Hubungan Indonesia dengan Malaysia dipulihkan dengan adanya normalisasi melalui Perjanjian Bangkok pada 1966.
Dianggap mencampuri urusan kenegaraan negara lain akibat menentang pembentukan federasi Malaysia karena tidak sesuai dengan erjanjian Manila yang telah disepakati sebelumnya.	Tidak mengintervensi karena konflik terjadi tidak dizaman ini.
Konflik yang semula terjadi antar negara meluas menjadi konflik antar warga negara. Warga negara kedua belah pihak saling sensitif dan penuh gejolak sosial.	Konflik antar warga negara mereda seiring dengan meredanya ketegangan antar kedua negara.

Berdasarkan informasi tabel 2, terdapat beberapa segi atau indikator yang dikomparasi dalam hubungan Indonesia dan Malaysia pada era soekarno dan soeharto. Indikator yang dibahas dalam tabel tersebut ada empat hal, yaitu segi keharmonisan hubungan kedua negara, pengaruh eksternal terhadap konflik yang terjadi, intervensi dalam urusan kenegaraan, serta dampak konflik yang ditimbulkan. Pada era soekarno, hubungan cenderung kurang harmonis karena adanya klaim kebudayaan dan geografi serta sengketa kepemilikan pulau di laut Sulawesi. Pada era Soeharto, hubungan mulai membaik perlahan. Pada era Soekarno, pengaruh buruknya hubungan Indonesia dan Malaysia diperparah dengan adanya federasi Malaysia yang didukung oleh Inggris. Namun, pada era soeharto, hubungan dipulihkan melalui normalisasi melalui perjanjian Bangkok pada 1966. Pada era soekarno, Indonesia dianggap mencampuri urusan kenegaraan negara lain dengan menentang pembentukan federasi Malaysia yang dianggap tidak sesuai dengan perjanjian Manila. Sedangkan pada era soeharto, tidak ada tindakan intervensi karena konflik tidak terjadi pada masa tersebut.

Pada era soekarno, konflik antara Indonesia dan Malaysia meluas menjadi konflik antar warga negara kedua belah pihak yang penuh gejolak sosial. Namun, pada era soeharto, konflik antar warga negara mereda seiring dengan meredanya ketegangan antara kedua negara. Soekarno menentang keras adanya wacana tersebut karena dianggap berpotensi masuknya nilai-nilai barat dan federasi Malaysia justru hanya diperalat untuk kepentingan barat. Soekarno tidak ingin Asia Tenggara kehilangan jati diri dan nilai hidup. Penentangan ini dilakukan dengan tegas sehingga menimbulkan konflik bilateral saat itu hingga meluas kepada sikap politik Indonesia di dunia internasional (PBB) saat masa konfrontasi tersebut. Di era Soeharto, berusaha keras memulihkan kembali hubungan antara Indonesia dengan Malaysia hingga tercapai kesepakatan damai antara dua negara. Dengan ini, konflik yang terjadi sejak 1963-1966 dianggap selesai. Komitmen damai yang tercipta terjalin dengan baik, terbukti dengan tidak adanya konflik berarti antar dua negara dimasa pemerintahan soeharto. Pada tahun 2002 konflik mulai terjadi kembali dengan sebab perebutan pulau Sipadan dan Ligitan.

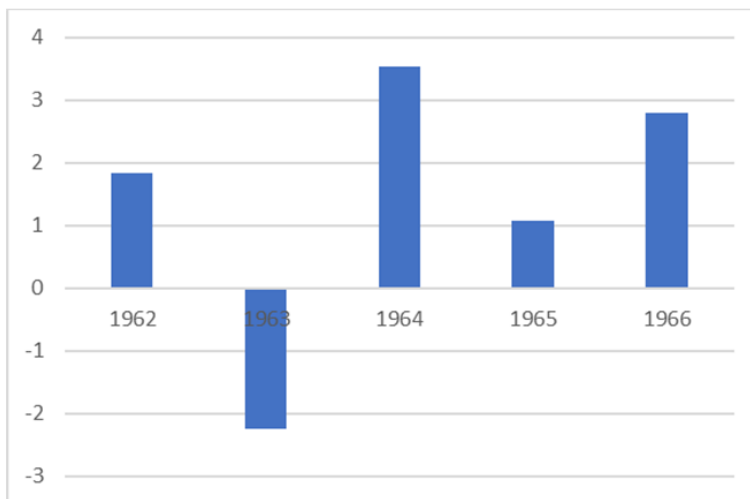
Dampak konfrontasi terhadap Indonesia

Masyarakat Malaysia dan Indonesia menjalin hubungan kekerabatan jauh sebelum kedua negara tersebut terbentuk yang menimbulkan kesamaan budaya, adat istiadat, dan kebiasaan. Namun, pada kenyataannya, cara pandang kebangsaan masing-masing negara tidak selalu sejalan sehingga memicu naik turunnya hubungan bilateral kedua negara bertetangga tersebut (Sulistiyono et al., 2023). (Fakih, 2017) berpendapat bagaimana Indonesia memandang Malaysia ada kaitannya dengan identitas nasional bangsa Indonesia. Secara historis hubungan sosial kedua warga lebih terikat secara emosional dalam hubungan kekerabatan berupa hubungan darah perkawinan. Hubungan ini diperkuat oleh hubungan simbiosis mutualisme melalui pengikatan jaringan perdagangan antara kedua negara. Warga perbatasan, hanya menginginkan kesadaran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebelum adanya konfrontasi Indonesia-Malaysia, kondisi perekonomian antar dua negara, terutama didaerah perbatasan berjalan dengan sangat lancar dengan aktivitas ekspor impor terutama komoditas pertanian dan

ikan. Dengan adanya konfrontasi, hal tersebut menjadi terputus. Bahkan, sebelum adanya konfrontasi, kepulauan Riau dijuluki sebagai heaven of dollars atau surganya dolar. Disektor ekonomi, daerah Karimun yang paling terdampak akibat konfrontasi. Konfrontasi ini menyebabkan daerah Karimun menjadi terisolasi dari dunia luar. Dampak ini juga dirasakan oleh warga Karimun, terutama bagi para petani dan nelayan. Para petani tidak dapat menjual hasil perkebunannya kepada Malaysia dan Singapura. Hal yang sama juga dirasakan nelayan yang tidak dapat menjual hasil tangkapannya. Akibatnya, siklus perekonomian warga Karimun terganggu karena tidak ada pasar dan harus menemukan alternatif sumber pencaharian selama masa konfrontasi. Selain itu, resesi global yang terjadi pada 1963 juga membawa dampak buruk bagi Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan sikap Indonesia yang dipandang konfrontatif seperti keluar dari keanggotaan PBB sebagai imbas dari diangkatnya Malaysia sebagai salah satu dewan keamanan PBB saat kedua negara mengalami puncak ketegangan. Indonesia dimasa ini dikucilkan dari dunia internasional dengan banyak kecaman dan peringatan yang ditujukan kepada Indonesia. Imbasnya, Indonesia mengalami inflasi besar hingga mencapai 119% dimasa itu. Perekonomian Indonesia pulih dimasa pemerintahan soeharto, pada tahun 1965 dan berada pada puncak tertinggi ekonomi ditahun 1970-an dan 1980-an. Dari grafik yang ditunjukkan gambar 1 bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 5 tahun, dari tahun 1962-1966 menunjukkan hanya pada 1963 perekonomian Indonesia menempati posisi terburuk dalam grafik. Perekonomian Indonesia yang relatif buruk, terutama saat konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia terjadi di tahun 1963. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi hingga minus mencapai -2,24%. Keadaan terburuk ekonomi Indonesia di era pemerintahan soekarno. Indonesia kala itu dianggap menunjukkan sikap yang konfrontatif saat memutuskan untuk keluar dari PBB pada 20 Januari 1965. Selain mendapatkan citra yang tidak baik dari dunia internasional, konflik yang terjadi antara negara dengan aktor lain memberikan dampak buruk.

Gambar 1

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 1962-1966 (BPS, CEIC)



Terutama dibidang ekonomi di mana perdagangan yang menopang berdirinya suatu bangsa mulai rapuh. Disektor sosial, konfrontasi ini menimbulkan permasalahan sosial yang luas. Kondisi sosial masyarakat menjadi tidak stabil karena terjadi banyak aksi demonstrasi yang berujung pada perusakan fasilitas umum. Tak hanya itu, relasi antar warga negara juga turut memanas dan sensitif. Dampak ini juga terasa disektor politik. Konfrontasi ini tidak mendapat dukungan dari TNI yang kemudian membentuk kelompok anti soekarno, khususnya angkatan darat, sedangkan di sisi lain justru mendapat dukungan penuh dari partai komunis Indonesia. Kelompok anti soekarno ini menjalankan aksinya dengan cara menghubungi Malaysia diam-diam untuk segera mengupayakan perdamaian, seperti melalui upaya diplomasi. Hal ini ditentang keras oleh soekarno karena tidak ingin federasi Malaysia kemudian menjadi instrumen Inggris untuk membangun kolonialisme dan imperialisme gaya baru di Asia Tenggara. Hal ini tidak lepas dari pandangan soekarno yang anti kolonialis dan imperialis. Di sektor keamanan, Shiddiqy dan Sudirman (2019) menyampaikan kondisi keamanan di kawasan Asia Tenggara relatif aman dan damai. Tidak pernah ada konfrontasi langsung atau perang head to head antar negara di kawasan jika pernah terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, tetapi itu tidak terjadi. Pada era perang dingin, keamanan di kawasan Asia Tenggara dijamin oleh dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Konfrontasi Indonesia dan Malaysia memang meningkatkan ketegangan hingga pada masing-masing warga negara, tetapi untuk benturan secara fisik oleh aparat keamanan dan pertahanan tidak ada. Karena jika ada, konflik yang bermula dari kursi pemerintahan berpindah menjadi konflik militer.

Dampak konfrontasi terhadap Malaysia

Sebelum konfrontasi, Malaysia tergabung dalam Uni Malaya yang pembentukannya digagas Inggris pada 1946. Pembentukan mendapat penolakan, terutama suku asli melayu hingga dibubarkan dan berganti nama menjadi persekutuan tanah melayu atau federasi Malaysia pada 1948. Dengan adanya konfrontasi dengan Indonesia yang melibatkan negara Singapura, Filipina, juga Inggris, menyebabkan keadaan sosial menjadi tidak kondusif. Berbeda dengan keadaan di Indonesia, di Malaysia juga terjadi aksi demonstrasi besar serta perusakan kantor kedutaan besar RI di Kuala Lumpur. Indonesia biasanya menjadi pengeksport komoditas pertanian dan perikanan namun adanya konfrontasi, Malaysia mengalami kekurangan pasokan bahan makanan yang lama. Harga melambung tinggi karena ketersediaan barang tidak sesuai dengan besarnya permintaan, sehingga terjadi perdagangan illegal. Oleh karena Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan melarang segala bentuk perdagangan dan transaksi dalam bentuk apa pun. Hal ini dilakukan Indonesia sebagai wujud kemarahan dan untuk memberikan efek jera kepada Malaysia. Rakyat Malaysia yang sebelumnya bekerja dibidang perdagangan kini beralih profesi kepekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kesimpulan

Konfrontasi yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia berlangsung dari tahun 1963-1966. Konfrontasi ini diawali dengan rencana Malaysia untuk mendirikan federasi Malaysia

yang beranggotakan Sabah, Serawak, Singapura, dan Brunei dan dianggap sebagai wujud pelanggaran terhadap perjanjian Manila pada 1963. Konfrontasi ini populer dikenal sebagai ganyang Malaysia yang menyebabkan ketidakstabilan di kedua negara diberbagai sektor, seperti sektor ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Konflik ini diselesaikan pada masa pemerintahan orde baru melalui persetujuan Bangkok pada 11 Agustus 1966 yang ditandatangani oleh perdana menteri dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Melalui perjanjian ini konfrontasi dihentikan dan terjadi pemulihan hubungan diplomatik. Hasil penelitian ini berimplikasi pada pengembangan kajian berbasis sejarah, terutama pada metode pendekatan studi komparasi terhadap hubungan Indonesia dan Malaysia pada masa konfrontasi di era kepemimpinan Soekarno dan Soeharto. Artikel ini dapat dikembangkan dengan bahasan yang mendalam yang didukung dengan sumber referensi beragam. Hasil penelitian juga dapat divisualisasikan dengan penggunaan teknologi, seperti *vos viewer* juga *nvivo 12 plus*. Sehingga data maupun pola dapat divisualisasikan dengan lebih baik.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
- Booth, A. (2000). Poverty and inequality in the Soeharto era: An assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 36(1), 73-104.
- Budiawan. (2017). How do Indonesians remember Konfrontasi? Indonesia–Malaysia relations and the popular memory of “Confrontation” after the fall of Suharto. *Inter-Asia Cultural Studies*, 18(3), 364-375.
- Butcher, J. G. (2013). The International Court of Justice and the territorial dispute between Indonesia and Malaysia in the Sulawesi Sea. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 35(2), 235-257.
- Fakih, F. (2017). Malaysia as an “Other” in Indonesian popular discourse. *Inter-Asia Cultural Studies*, 18(3), 376-390.
- Farram, S. (2014). Ganyang! Indonesian popular songs from the Confrontation Era, 1963–1966. *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 170(1), 1-24.
- Huda, K. (2021). *BUKU AJAR METODE PENULISAN SEJARAH*. UNIPMA Press.
- Huynh, T. M., Kim, G., & Ha, H.-K. (2020). Comparative analysis of efficiency for major Southeast Asia airports: A two-stage approach. *Journal of Air Transport Management*, 89, 101898.
- Irshanto, A. B. (2019). Dari Konfrontasi Ke Perdamaian (Hubungan Indonesia–Malaysia 1963-1966). *CRIKSETRA: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(2), 84-97.
- Kusmayadi, Y. (2017). Politik Luar Negeri Republik Indonesia Pada Masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia Tahun 1963-1966. *Jurnal Artefak*, 4(1), 23-34.
- Maksum, A., & Bustami, R. (2014). The 1965 coup and reformasi 1998: two critical moments in Indonesia-Malaysia relations during and after the Cold War. *SpringerPlus*, 3, 1-9.

- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (38 ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A. S. (2016). Soekarno Dan Diplomasi Indonesia. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 10(2), 125-130.
- Sulistiyono, B. B., Paryanti, A. B., Sinaga, N. A., Purbowati, L., Cendhayanie, R. A., & Gaol, S. L. (2023). Malaysia–Indonesia Conflict: In the National Interpretation 1963–2010. *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture*, 33, 1122-1133.
- Sunarti, L. (2014). Politik Luar Negeri Malaysia terhadap Indonesia, 1957-1976: Dari Konfrontasi Menuju Kerjasama. *SUSURGALUR*, 2(1).
- Windari, S., & Aziz, M. I. (2022). Moderatisme Politik Islam Indonesia Era Soekarno: Studi Resolusi konflik Indonesia–Malaysia. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 6(1), 101-117.